

Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo Kota Bandung

Rendra Wendriana Mamudi^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *rendra_am20@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 10, 2025

Revised Januari 15, 2025

Accepted Januari 20, 2025

Available online Januari 24, 2025

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Stunting, Kesehatan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

Keywords:

Collaborative Governance, stunting, public health, community participation

Dengan demikian, Collaborative Governance dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting di wilayah tersebut.

ABSTRAK

Penanganan stunting di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam upaya penanganan stunting. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara di berbagai instansi terkait, seperti Kantor Kelurahan dan UPT Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan program yang efektif untuk mengatasi stunting. Pemerintah berperan sebagai regulator, sementara masyarakat sipil berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan berbagai pihak. Selain itu, media juga berperan dalam menyebarkan informasi mengenai program-program yang ada. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam penanganan stunting.

ABSTRACT

The handling of stunting in Indonesia became one of the main challenges in improving the quality of public health, especially in Cisaranten Wetan Village, Cinambo District, Bandung City. This study aimed to analyze the implementation of Collaborative Governance in efforts to address stunting. The method used was a case study with a qualitative approach, which involved the collection of primary data through interviews at various related institutions, such as the Village Office and the UPT Puskesmas. The results of the study showed that collaboration among the government, the community, and the private sector was very important in creating effective programs to tackle stunting. The government acted as a regulator, while civil society served as a mediator connecting various parties. Additionally, the media played a role in disseminating information about existing programs. This study emphasized the importance of effective communication and cooperation among various parties to achieve common goals in addressing stunting. Thus, Collaborative Governance became an effective strategy in improving public health and reducing stunting rates in the region.

PENDAHULUAN

Memberikan pelayanan kesehatan merupakan salah satu tugas utama pemerintah dalam menciptakan kemakmuran bagi suatu negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk mencegah serta mengobati penyakit mental maupun fisik. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan menjamin kesehatan masyarakat. Penyediaan layanan kesehatan yang optimal dapat secara signifikan menurunkan angka kematian, terutama bagi anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan optimalisasi layanan kesehatan, permasalahan kemiskinan di Indonesia dapat

diatasi secara bertahap. Salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah masalah kesehatan pada generasi muda, terutama stunting. Stunting merupakan permasalahan nasional yang menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Stunting didefinisikan sebagai kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak bayi. Anak dikategorikan stunting apabila panjang atau tinggi badannya kurang dari dua standar deviasi dari panjang atau tinggi badan anak seusianya (WHO, UNICEF, Group, 2018). Faktor-faktor yang menyebabkan stunting meliputi pola asuh yang tidak optimal, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan pembelajaran dini, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, serta kurangnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai.

Penelitian menunjukkan bahwa stunting tidak hanya memengaruhi kinerja akademik anak, tetapi juga berdampak pada produktivitas ekonomi di masa dewasa (Daniels et al., 2004; Dewey & Begum, 2011; Horton & Steckel, 2014; Kar et al., 2008; Mendez & Adair, 1999). Selain itu, stunting juga meningkatkan biaya pelayanan kesehatan (Victor et al., 2014). Sebuah studi di Indonesia oleh Hoddinott et al. (2020) menyebutkan bahwa investasi untuk mengurangi stunting memberikan keuntungan ekonomi hingga 48 kali lipat. Jika anak-anak stunting yang tumbuh dalam keluarga miskin tidak tertangani, kemungkinan besar mereka akan tetap hidup dalam kemiskinan di masa depan. Oleh karena itu, penanggulangan stunting menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah.

Stunting merupakan masalah multidimensional yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Tidak hanya sektor kesehatan, sektor non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ketahanan pangan, dan jaminan kesehatan turut berkontribusi besar dalam penanganan masalah gizi, yakni sebesar 70% (Rosha et al., 2016).

Upaya penanggulangan stunting memerlukan pendekatan holistik, termasuk intervensi dalam bidang kesehatan dan gizi jangka pendek yang dapat memberikan hasil dalam waktu relatif singkat. Selain itu, lingkungan sosial seperti pola pengasuhan anak, peran ibu, dan pemberdayaan masyarakat di daerah miskin perkotaan maupun pedesaan merupakan aspek penting dalam mengatasi stunting (Beal et al., 2018).

Penanganan stunting juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *collaborative governance*. Menurut Duan et al. (2020) yang dikutip oleh Hertati & Arif (2022), kolaborasi antarlembaga dilakukan dengan komitmen tinggi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem tata kelola kolaboratif melibatkan diskusi, dialog, dan kerja sama antara institusi pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah. Hal ini juga didukung oleh Kurniasih (2017), yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penyelesaian masalah bersama.

Berdasarkan analisis dan data di atas, peneliti berupaya meneliti lebih dalam mengenai *Collaborative Governance* dalam penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ndraha (2003: 6), pemerintahan merupakan fenomena sosial yang mencerminkan hubungan antar anggota masyarakat, baik itu hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (2003: 12) berpendapat bahwa pemerintah dalam arti luas mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah

tidak hanya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan tugas administratif, tetapi juga mencakup fungsi legislatif dan yudikatif dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat.

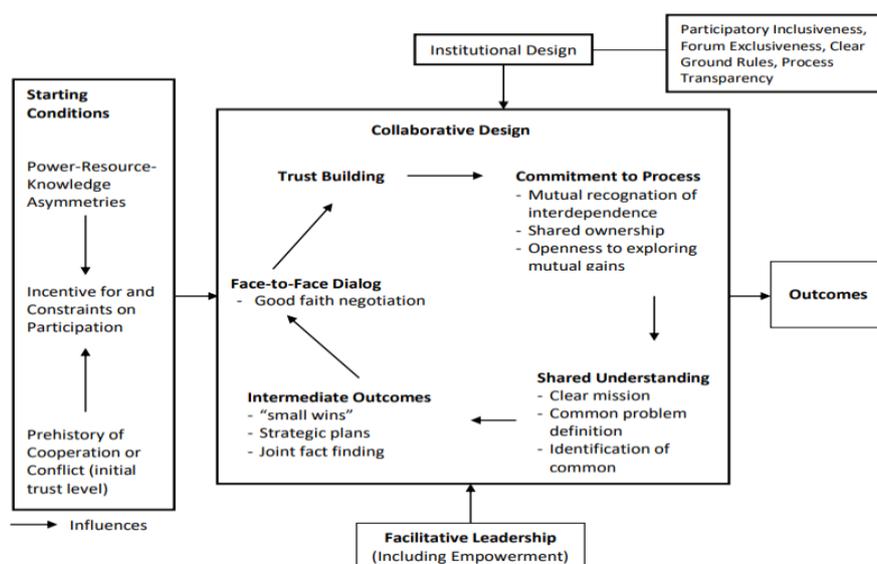
Pemerintahan sebagai fenomena sosial terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana hubungan antar manusia dan kelompok sangat penting. Bahkan dalam konteks keluarga, terdapat perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti keselamatan, istirahat, sandang, dan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, masyarakat perlu bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan sekunder, diperlukan komunikasi yang efektif melalui bahasa yang disepakati bersama, serta lembaga sosial yang berfungsi untuk mengontrol aktivitas dan perkembangan masyarakat. Kebutuhan sekunder ini mencakup kerja sama, penyelesaian konflik, dan interaksi antar sesama warga negara.

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah penanganan permasalahan stunting. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Memahami konsep *Collaborative Governance*, istilah "*governance*" berasal dari kata "pemerintahan". Pemerintah diartikan sebagai organisasi atau lembaga yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Konsep pemerintahan ini merupakan konsep lama dalam administrasi publik yang hanya menekankan pada pemerintah sebagai satu-satunya pengatur dan penegak administrasi publik. Seiring perkembangan zaman, muncullah konsep *governance* yang lebih luas, mencakup seluruh proses, peraturan, dan institusi yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian urusan kolektif masyarakat. Tata kelola mencakup keseluruhan organisasi dan elemen masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Tata kelola kolaboratif adalah jenis tata kelola yang mendorong upaya bersama antara para pemangku kepentingan, termasuk pemangku kepentingan non-pemerintah, untuk secara kolaboratif mengatasi permasalahan kompleks melalui pengambilan keputusan dan implementasi kolektif (Gray, 1989; Bingham, 2008; Farazmand, 2004). Keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan dalam tata kelola kolaboratif sangat penting untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan secara efektif mengatasi permasalahan yang kompleks (Bryson, 2006; Allison, 2004). Oleh karena itu, tata kelola kolaboratif mendorong penyelesaian masalah secara bersama-sama melalui keterlibatan pemangku kepentingan utama, serta memberikan alternatif terhadap pengelolaan, pembuatan kebijakan, dan implementasi yang bersifat top-down.

Ansell dan Gash (2008: 543) menggambarkan tata kelola kolaboratif sebagai strategi baru yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan politik dalam forum yang sama untuk mencapai kesepakatan bersama. Mereka menyoroti enam kriteria untuk proses tata kelola kolaboratif, di mana forum diprakarsai oleh otoritas publik, peserta forum mencakup aktor non-negara, dan peserta terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, bukan sekadar berkonsultasi dengan pemerintah. Forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara teratur, tindakan yang diambil harus berdasarkan konsensus, dan kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2008: 544).



Gambar 2. Model Collaborative Governance Ansell & Gash
Sumber: Model of *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008)

Tata kelola kolaboratif, menurut Ansell dan Gash (2008), adalah model manajemen di mana lembaga publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dalam pembuatan dan implementasi kebijakan serta program publik. Dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif, Ansell dan Gash (2008) mengidentifikasi empat variabel utama yang berperan penting, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi.

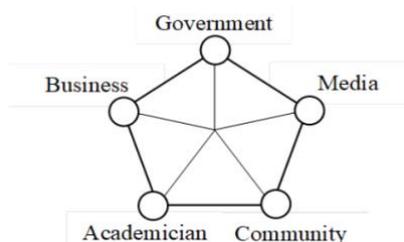
Kondisi awal mencakup adanya sumber daya kekuasaan, asimetri pengetahuan, atau kesenjangan kekuasaan dan sumber daya di antara pihak-pihak yang berkolaborasi. Selain itu, sejarah kerjasama atau konflik yang ada di antara aktor-aktor juga mempengaruhi tingkat kepercayaan, di mana ketidakseimbangan sumber daya dan sejarah tersebut dapat menciptakan insentif atau hambatan terhadap partisipasi. Desain kelembagaan merujuk pada protokol dan peraturan yang mengatur kolaborasi, yang memainkan peran penting dalam melegitimasi prosedur kolaborasi. Desain ini juga mencakup deskripsi aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Kepemimpinan menjadi aspek krusial dalam kolaborasi, di mana semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama dalam semangat kooperatif. Dalam proses kolaborasi, konflik atau ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan dapat muncul, sehingga penting untuk mengelola dinamika ini dengan baik. Proses kolaborasi itu sendiri dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pertama, dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) merupakan proses yang muncul dari interaksi langsung antara seluruh pemangku kepentingan. Dalam tahap ini, penting untuk mengidentifikasi peluang dan manfaat kelompok, yang menjadi ciri khas tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada proses. Selanjutnya, tahap membangun kepercayaan (*trust building*) menjadi penting, di mana kolaborasi harus berfokus pada upaya membangun rasa saling percaya antar pihak, bukan sekadar tujuan negosiasi. Kepercayaan ini harus dibangun sejak awal proses kolaborasi.

Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) juga menjadi elemen penting, di mana para peserta harus memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam tata kelola kolaboratif.

Menghindari risiko yang terkait dengan kolaborasi memerlukan komitmen serius dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, pemahaman bersama (*shared understanding*) di antara para aktor yang terlibat sangat penting untuk mencapai tujuan proses, sehingga semua pihak sepakat mengenai apa yang dapat dicapai bersama. Proses kolaborasi juga menghasilkan hasil antara (*intermediate outcomes*), yang mencakup hasil dan manfaat dari pencapaian tujuan kolaborasi, serta manfaat kecil yang diperoleh dari kolaborasi tersebut.

Model Pentahelix merupakan model kolaboratif yang terdiri dari lima elemen pemangku kepentingan, yaitu akademik, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah, dan media. Model ini dikenal dengan konsep ABCGM (*Academician, Business, Community, Government, dan Media*) (Slamet et al., 2017). Komitmen dan sinergi yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan inovasi bersama dalam konteks ini. Inovasi seharusnya dicapai melalui kolaborasi yang sinergis, didukung oleh sumber daya yang memberikan sinergi optimal. Kerja sama dalam kerangka Pentahelix berperan penting dalam mendukung tujuan inovasi bersama dan mendorong perkembangan sosial ekonomi kawasan. Menurut Soemaryani (2016) yang dikutip dalam Khusniyah (2020), model Pentahelix menjadi acuan untuk mengembangkan sinergi antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Unsur Pentahelix muncul dari konsep *triple helix* yang melibatkan akademisi, dunia usaha, dan pemerintah. Konsep ini berfokus pada hubungan antara universitas, bisnis, dan pemerintah, dan kemudian ditambahkan unsur komunitas atau masyarakat sipil, sehingga berkembang menjadi *quadruple helix*. Akhirnya, elemen atau medium lain ditambahkan, dan model ini berkembang menjadi *pentahelix*. Pentahelix berperan penting dalam penanggulangan *stunting* di Indonesia melalui kolaborasi sinergis antara lima pihak.



Gambar 2. Model Kolaborasi Pentahelix

Sumber: Awaluddin et al., 2016

Lima komponen pentahelix yang saling bersinergi memiliki kontribusi masing-masing yang saling berkaitan. Akademisi berperan sebagai konseptor, di mana mereka menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan konsep-konsep teoritis yang mereka analisis. Aktor akademis memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam pengembangan proyek atau kebijakan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, komponen bisnis berperan sebagai enabler, menjalankan proses bisnis terkait program yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan dan menciptakan nilai lebih. Kelompok usaha ini mencakup perwakilan usaha seperti koperasi, pengacara, akuntan, dan profesional lainnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Komunitas, atau masyarakat sipil, berperan sebagai akselerator. Dalam konteks ini, masyarakat terdiri dari individu-individu yang berkepentingan dan terkait dengan program yang dilaksanakan, berfungsi sebagai mediator atau penghubung antar para pihak. Pemerintah bertindak

sebagai regulator, di mana pemerintah mengeluarkan peraturan dan bertanggung jawab melaksanakan program. Kelompok ini mencakup organisasi kebudayaan yang didanai publik, parlemen, polisi, militer, rumah sakit, dan layanan publik lainnya, baik di tingkat nasional maupun lembaga nasional terkait. Terakhir, media berperan sebagai ekspander, mendukung publikasi program yang dilaksanakan. Peserta dalam kelompok ini terdiri dari berbagai jenis media, baik digital maupun konvensional, yang didorong oleh kepentingan untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat luas tentang program yang mereka miliki.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Metode penelitian kualitatif dianggap sebagai metode baru karena popularitasnya yang belum lama, dan dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, serta metode interpretatif, karena data yang dihasilkan lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2014:7-8). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Arikunto dalam Gunawan (2013:115), studi kasus adalah salah satu pendekatan yang dilakukan dengan memberikan pemahaman secara deskriptif, di mana penelitian dilakukan secara terperinci dan mendalam pada suatu organisme. Fokus penelitian diperlukan untuk membuat batasan atau panduan dalam penelitian, yang juga dapat membantu dan menjadi dasar bagi efektivitas penyaringan informasi. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu melalui wawancara di Kantor Kelurahan Cisaranten Wetan, UPT Puskesmas Kecamatan Cinambo, dan Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Sementara itu, data sekunder didapatkan dengan mempelajari bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak mencari bukti untuk mendukung penerimaan atau penolakan proposal yang dikembangkan sebelum penyelidikan lapangan dimulai. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti membuat abstraksi yang mencerminkan keunikan fenomena yang diteliti. Ketika abstraksi ini berkembang, maka akan menjadi teori. Penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, akan dilaksanakan di alamat Jl. Golf Raya No. 5-7, Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance adalah suatu proses pengambilan keputusan secara formal dalam pengambilan keputusannya berpatokan dan berlandaskan pada musyawarah dan mufakat, terdapat proses pembagian tugas pokok dan fungsi tentang peran dalam pelaksanaan kebijakan publik serta pengelolaan programnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kerangka *Collaborative Governance* yang

dilakukan melalui rangkaian tahapan, seperti tahapan *face to face dialogue*, *Trust Building*, *Commitment to process*, *share understanding* dan *Intermediate outcomes*.

Kondisi Awal (*Starting Conditions*) dalam *Collaborative Governance* mengacu pada keadaan atau faktor-faktor yang ada sebelum proses kolaboratif dimulai, Hasil analisis dari penelitian tentang kondisi awal sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan dan arah program, dimana program dan kebijakan yang dibuat akan berlandaskan pada kebutuhan yang sesuai dengan pemecahan masalah yang ada dilingkungan Kelurahan Cisaranten Wetan.

Pemimpin memiliki peran krusial dalam memfasilitasi dinamika yang muncul dalam penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Dalam model tata kelola kolaboratif ini, kepemimpinan bukan hanya tentang otoritas atau pengendalian terhadap keputusan, melainkan lebih kepada memfasilitasi proses yang inklusif dan partisipatif yang memungkinkan berbagai Lembaga dalam berkolaborasi.

Membangun kepercayaan diantara lembaga-lembaga dalam penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan sangat penting dilakukan, hal ini akan mendukung keberhasilan pencegahan dan penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan. Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan Cisaranten Wetan bahwa komitmen terhadap proses merupakan syarat penting dalam mensukseskan upaya dalam penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, Sesuai dengan hasil penelitian, Penulis berpendapat bahwa komitmen bersama merupakan hal yang sangat penting, suatu program atau kegiatan akan berjalan dengan baik dan berhasil ketika masing-masing lembaga yang menanganinya mempunyai komitmen bersama yang baik. Sehingga tetap konsisten dalam menjalankan apa yang sudah menjadi program dan prioritas utama dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan, program-program dalam kerangka *Collaborative Governance* sering kali melibatkan pemerintah, masyarakat, (LSM), dan sektor swasta.

Dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap proses sangat penting dalam penanganan stunting. Komitmen ini mencakup pembentukan tim yang solid, pelaksanaan rencana kerja yang jelas, monitoring dan evaluasi yang rutin, serta adaptasi terhadap tantangan yang muncul. Komitmen semua lembaga yang terlibat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program penanggulangan stunting. Dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan Cisaranten Wetan bahwa pentingnya *share understanding* (saling memahami) dijelaskan sebagai elemen kunci yang memfasilitasi kerjasama yang efektif dalam penanganan stunting, dengan fokus pada bagaimana pemahaman bersama antara semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan keberhasilan program.

Kolaborasi merupakan Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan permasalahan *stunting* yang terjadi di Kelurahan Cisaranten Wetan bertujuan untuk mengetahui permasalahan, hambatan dan perencanaan strategi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam upaya penanganan stunting.

Hasil penelitian di Kelurahan Cisaranten Wetan menggambarkan bagaimana sektor akademis berperan secara konkret dan kolaboratif dalam penanganan stunting, serta tantangan yang di hadapi dalam upaya penanganan stunting. Peran Lembaga akademis dalam hal ini STFI ikut memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, Akademisi juga ikut dalam membantu masyarakat yang memerlukan pendampingan terkait stunting, kontribusi konkret akademis dalam program upaya penanganan dan pencegahan stunting dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk identifikasi factor penyebab stunting dan cara mengatasinya.

Peran dari lembaga usaha swasta belum terlalu optimal dalam Upaya penanganan stunting di kelurahan cisaranten wetan, hal ini dapat kita lihat dari belum banyaknya pengusaha yang ikut membantu dalam upaya penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan.

Maka dari itu, perlunya koordinasi dan konsolidasi lebih baik lagi dengan pengusaha, sehingga bisa ikut bersama-sama dalam menekan dan menaggulangi permasalahan stunting. Dengan kolaborasi yang baik bersama pengusaha yang ada di lingkungan Kelurahan Cisaranten Wetan upaya dalam menangani kasus stunting akan lebih baik dan optimal.

Peran *Community* atau *Civil Society* dalam penanganan stunting model Pentahelix mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan kesadaran Masyarakat akan partisipasi aktif dalam program kesehatan, perubahan perilaku sehat masyarakat, hingga kolaborasi dengan Lembaga lain.

Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam upaya mengurangi *prevalensi stunting*, karena mereka berada di garis depan dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi di kelurahan. Sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan media merupakan kunci dalam memastikan upaya penanganan stunting yang efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah yang bekerja sebagai lembaga regulator dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta melindungi kepentingan umum.

KESIMPULAN

Pemerintah kewilayahan, seperti kelurahan, puskesmas, dan dinas kesehatan, berperan aktif dalam mendukung kebijakan penanganan stunting. Masyarakat, termasuk TP. PKK dan kader posyandu, juga berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang kesehatan dan gizi. Sektor swasta diharapkan berkolaborasi melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung pencegahan stunting, seperti penyediaan makanan bergizi. Untuk meningkatkan penanganan stunting, perlu dibentuk forum diskusi di tingkat kelurahan yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Kegiatan dalam forum ini meliputi pertemuan rutin, penyuluhan, dan pelatihan tentang stunting dan gizi. Koordinasi antar pihak sangat penting, dan monitoring serta evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Pendekatan Collaborative Governance dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanganan stunting dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang beragam.

Saran untuk penanganan stunting di Kelurahan Cisaranten Wetan meliputi pemetaan stakeholder, pembentukan forum kolaborasi, pembentukan satuan tugas untuk berkoordinasi dengan sektor swasta, serta pengumpulan data terkait prevalensi stunting dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya. Data ini akan membantu merancang intervensi yang tepat dan menilai efektivitas program.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance* In Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Astuti, R.S, Warsono, H. & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the Productivity of *Collaborative Governance* Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance and Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Essa W.Y (2020). Strategi Penanganan Stunting Kota Bandung (Penelitian Mandiri). Bappelitbang Pemerintah Kota Bandung. <https://litbang.bandung.go.id/detil-hasil-kelitbangan/strategi-penanganan-stunting-kota-bandung-penelitian-mandiri-2020>
- Fatikha, N. T. (2024). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Gunawan, Imam. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hapsari, S.W (2023). *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Temanggung
- Ipan, Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Stunting. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(3), 383–391.
- Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.549-DPPKB/2022 Tentang *Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2022*
- Noor, M., Suaedi, F & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance* Suatu Tinjauan Teori dan Praktik. Yogyakarta. CV. Bildung Nusantara.
- Pemkot Bandung Targetkan Prevalensi Stunting 14 Persen Di Tahun 2023. Diakses Pada 16 Mei 2024. Dari <https://www.bandung.go.id/news/read/7575/pemkot-bandung-targetkan-prevalensi-stunting-14-persen-di-tahun-2023>
- Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang *Percepatan Penurunan Stunting*.
- Putri, E. N. (2021). 1. Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 68-85. 2, 68 - 85.
- Putri, A. A., & Hertati, D. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jombang. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 69-81.
- Salsabila, F. S., & Santoso, R. S. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-22.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.